



KETAHANAN IDEOLOGI (PANCASILA) DI MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19

Ideological Resilience (Pancasila) in Society During Covid 19 Pandemic

Hastangka¹

¹Universitas Mercu Buana Yogyakarta, email:hastangka@gmail.com,
HP.082226293091

ABSTRAK: Tulisan ini merupakan riset fenomenologi sosial dan politik yang berkembang di wilayah DIY dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Riset ini memfokuskan tentang dinamika sosial dan politik yang berkaitan dengan ketahanan nasional pada wilayah secara khusus berkaitan dengan ideologi dan kebangsaan. Persoalan persoalan kebangsaan yang terjadi 10 tahun terakhir secara nasional pada dasarnya mengarah pada empat isu utama yaitu politik identitas, politisasi agama, intoleransi, dan konflik ideologis yang berpengaruh pada pelemahan nilai nilai Pancasila. Konflik ideologis ini dapat ditelusuri dari munculnya gerakan radikalisme, fundamentalisme, dan aksi terorisme yang mengarah pada ancaman akan keutuhan bangsa dan negara dan ketahanan nasional. Tujuan dari tulisan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena sosial dan politik kebangsaan yang terjadi di wilayah melalui studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosial dan politik melalui observasi dan penelusuran dokumen fata dan data data terkait isu isu ideologis dan kebangsaan yang diberitakan melalui media cetak baik elektronik maupun cetak tentang DIY. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis dan induktif untuk mendapatkan esensi dari persoalan yang muncul. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan ideologi di masyarakat pada masa pandemi covid 19 semakin melemah karena situasi dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang juga melemah. Masuknya ideologi baru semakin mudah melalui media sosial dan elektronik untuk membawa ideologi baru berpotensi memperlemah ketahanan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan ideologi di masyarakat kurang tangguh dan perlu diperkuat dengan mengembalikan nilai nilai Pancasila.

Kata kunci: Ideologi, Pancasila, fenomenologi.

ABSTRACT: This paper is a research on social dan political phenomenology that develops in the Special Region of Yogyakarta during the last 10 years. It focuses on social and political dynamics related to national resilience in one region specifically related to ideology and nationality. The issue of nationality that occurred in the last 10 years nationally, mostly concerning these four main issues which are identity politics, the politicization of religion, intolerance, and ideological conflicts that eventually results in the weakening of the Pancasila values. This ideological conflict can be seen from the emergence of radicalism, fundamentalism, and acts of terrorism that threatened the integrity of the nation and state, as well as the national security. This paper is aimed to describe and analyze the social and political phenomena of nationality that occurs in one region through the case study in the Special Region of Yogyakarta. The research method uses the social and political phenomenology approach through observation and tracing of documents and data related to ideological and national issues that are reported in both printed and electronic media mentioning the Special Region of Yogyakarta. The analysis used in this study is critical and inductive analysis to get the essence of the problems that arise. The results of this study indicate that the ideological resilience in the society during the Covid 19 pandemic has weakened due to the weakening of social, political, and economic situations and conditions. New ideologies emerge and spread easier through social and electronic media and potentially disrupt the national resilience on ideology. This research concludes that the ideological resilience in the society needs to be strengthened by the restoration of Pancasila values in the life of the society, the nation, and the state.

Keywords: ideology, Pancasila, Phenomology.



PENDAHULUAN

Ketahanan ideologi di Indonesia menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam periode pasca reformasi. Dalam studi ketahanan nasional setidaknya terdapat 8 topik yang dibahas merujuk pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia yaitu: ketahanan politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya, geografi, demografi, dan sumber daya alam. Sejak Lemhannas memiliki laboratorium pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtanas) dan merilis indeks ketahanan nasional dari 5 gatra dengan standar penilaian rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh. Isu ketahanan nasional menjadi perhatian masyarakat. Ketahanan nasional suatu bangsa dan negara menjadi penting untuk dilihat dan ditinjau ulang karena akan berpengaruh pada stabilitas nasional apabila kondisi ketahanan nasional suatu negara dalam kondisi rawan atau kurang tangguh. Studi ini akan mengkaitkan isu ketahanan nasional dan ideologi secara khusus Pancasila pada masa pandemi covid 19 terhadap masuknya ideologi lain atau paham radikal yang membawa perubahan orientasi nilai dan prinsip prinsip dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Ideologi menjadi bagian penting dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang memiliki fondasi dan dasar nilai dan ideologi yang kuat akan dapat bertahan dalam berbagai macam tantangan termasuk pada masa pandemi covid 19. Ideologi mengandung berbagai macam pengertian dan tafsir. Ideologi dalam aspek terminologi dipandang sebagai bagian dari konstruksi pemikiran manusia sebagai *zoon politicon*. Hakikat *zoon politicon* sebagai salah satu dari hakikat manusia yang bermasyarakat, berkelompok, dan berkoloni satu dengan yang lain. Ide tentang manusia, individu, dan

masyarakat sudah lama dirumuskan dan dibicarakan oleh para pemikir dan filsuf ribuan tahun yang lalu. Begitu juga dalam pembahasan tentang pengertian dan makna ideologi mengalami berbagai dinamika Pengertian. Di Indonesia, pengertian ideologi mengarah pada tiga periode waktu yaitu: pertama, ideologi yang lahir dan berproses dari zaman sejarah kalam bangsa Indonesia yaitu periode tahun 1965 ketika terjadi tragedi peristiwa gerakan 30 September.

Konsep sosialis dan komunis menjadi bagian dari reproduksi pemikiran manusia, pemerintah, dan masyarakat tentang maksud dari ideologi merujuk pada peristiwa tersebut. Sehingga pada periode setelah 1965 selalu muncul slogan atau *tag line* "Awas Bahaya Ideologi Komunis", atau "bahaya laten ideologi sosialis dan komunis". Ideologi lain yang selalu disinggung dan muncul dalam masyarakat ialah isu ideologi kapitalisme dan liberalisme dalam bidang ekonomi. Kedua, periode munculnya lembaga dan regulasi terkait ideologi. Wacana tentang ideologi berkembang dalam kehidupan masyarakat setelah Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Lahirnya, Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) menjadi proses evolusi penting dalam aspek pemahaman dan pemaknaan atas ideologi.

Pancasila selain diperkenalkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian juga berkembang pemikiran tentang Pancasila yang disebut sebagai ideologi bangsa dan ideologi negara. Kedua istilah ini mewarnai berbagai dokumen dan buku buku sejarah tentang Pancasila dan buku tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan



Pengamalan Pancasila (BP-7). BP 7 mulai memperkenalkan dan memuat konsep ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi terbuka. BP-7 merupakan lembaga negara yang dibuat untuk merumuskan dan mengembangkan wawasan Pancasila kepada para penyelenggara negara, masyarakat, dan para pendidik. Periode ini menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena masyarakat dan kalangan terpelajar pada era tersebut mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ideologi dari program P4. Ketiga periode paska reformasi, periode ini muncul pemahaman dan uraian tentang ideologi lebih beragam ketika fase peralihan kekuasaan atau pemerintahan dari pemerintahan Soeharto ke era reformasi. Era reformasi menjadi era perubahan yang mendasar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ide demokratisasi semakin menguat disuarakan, penegakan supermasi sipil lewat perlindungan HAM, perluasan akses masyarakat sipil berdemokrasi, menyatakan pendapat, dan menyampaikan aspirasi melalui berbagai macam saluran, serta kebebasan media pers dalam meliput isu isu politik dan HAM semakin terbuka.

Era reformasi pada tahun 1998/9 menjadi titik pijak penting bagi masyarakat Indonesia untuk membangun tatanan sosial dan politik masyarakat yang baru. Dinamika kehidupan sosial dan politik tersebut dianggap sebagian pengamat tidak hanya sekedar sebagai adanya pergantian rezim dan kebebasan aktivitas berpolitik, tetapi terjadi kemunculan pergeseran karakteristik hubungan negara dan masyarakat (Manan, 2005:30). Sejak reformasi dan kran demokrasi terbuka lebar bagi siapa saja termasuk organisasi masyarakat.

Kondisi telah melahirkan berbagai kelompok organisasi masyarakat, partai politik baru, serta kontestasi dalam pemilihan kepala daerah, Gubernur, dan presiden. Hal ini juga diuraikan oleh Hakim (2020:9) pasca tumbangny

rezim otoritarianisme, demokrasi menjadi arena bagi berbagai kelompok sosial untuk mengartikulasikan kepentingan, identitas, dan keagensiannya dengan memobilisasi beragam modalitas yang mereka miliki (agama, etnis, dan lainnya).

Kran demokrasi yang terbuka lebar telah membawa masuk berbagai ideologi baru ke dalam masyarakat dan sistem pemerintahan. Ideologi baru ini muncul dari berbagai latar belakang terutama latar belakang ideologi transnasional yang sudah mengakar di berbagai negara yang berhaluan garis keras. Peristiwa 11 September 2001 di kota New York, Amerika Serikat sebagai salah satu bentuk ‘serangan’ ideologis dan politik menghancurkan gedung *World Trade Center* (WTC). Gedung ini dianggap menjadi ikon dari ideologi kapitalisme oleh sebagian kelompok masyarakat dan kelompok dari negara negara yang bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Aksi ini kemudian dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat sebagai serangan terorisme. Sejak itu, istilah “terorisme”, “radikalisme”, “fundamentalisme”, “ekstrimisme”, dan “intoleran” mulai menjadi wacana publik dan mewarnai berbagai pemberitaan baik berita internasional dan nasional di berbagai negara (Farida, 2015; Robingaton, 2017). Pada tahun 2002, di Indonesia muncul sebuah serangan “brutal” berupa aksi teror bom bunuh diri di Bali yang menewaskan ratusan orang baik lokal dan internasional. Aksi teror bom bunuh diri ini mulai masif dan meningkat di sejumlah daerah khususnya daerah Ibu Kota Jakarta. Pertarungan ideologis pada era pasca reformasi mulai terbuka ditandai dengan muncul dan menguatnya gerakan organisasi mengatasnamakan agama seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi sejenis mulai banyak di daerah daerah.

Gerakan ini tidak hanya sebagai gerakan keagamaan tetapi juga gerakan untuk memberikan keseimbangan atas kekuasaan yang sah sebagai gerakan semacam alat negara baru untuk



melakukan aksi aksi *sweeping* dan melakukan tindakan hukum sendiri. Hal ini juga dibaca sebagai gerakan ideologis yang mengarah pada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi nasional. Kasus kasus keberadaan ideologi yang berkembang dan berhaluan berbeda dengan nilai nilai Pancasila oleh kelompok organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya untuk menguatkan identitas mereka.

Sejak transisi demokrasi terjadi di Indonesia nilai nilai kebangsaan dan Pancasila mulai terabaikan. Rokhmad menyebutkan bahwa sejak pasca reformasi dengan ditandai terbukanya kran demokrasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok islam radikal (Rokhmad, 2012). Pada tahun 2017, HTI dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah melalui Pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020, FPI juga dinyatakan resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama yang ditanda tangani enam pejabat kementerian dan lembaga (SKB,2020).

Proses ideologisasi kelompok kelompok tersebut semakin menguat dengan menggunakan jalan demokrasi dan memanfaatkan negara demokrasi yang dalam kondisi lemah. Kelemahan negara ini digunakan sebagai jalan untuk masuk mengambil sistem pemerintahan, mengambil alih peran peran alat negara yang sah, serta mendominasi dalam berbagai kesempatan dan peluang mempengaruhi dan menguasai wilayah sipil dan kekuasaan menjadi satu monopoli kelompok tertentu. Muatan muatan ideologis tertentu yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila selalu saja menjadi perdebatan di masyarakat, apa yang menjadi landasan satu ideologi tertentu digunakan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara di negara Pancasila? Bagaimana ideologi tersebut memaksakan nilai nilai yang lain untuk membenarkan nilai nilai yang mereka yakini? Bagaimana ideologi itu menjadi pedoman dalam perilaku dan sikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Pada periode ini, ketahanan ideologi di Indonesia dalam kondisi lemah, nilai nilai yang sudah ada seperti kearifan lokal, nilai nilai Pancasila mulai tergerus oleh berbagai macam aksi aksi yang mengganggu ketertiban umum, kenyamanan, keharmonisan masyarakat, dan ketenangan masyarakat. Studi Maharani, Surono, Sutarmanto, Zubaidi menyatakan bahwa problematika ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia terjadi karena munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktek liberalisasi di berbagai aspek kehidupan (Maharani, Surono, Sutarmanto, Zubaidi,2019).

Pada periode tahun 2016-2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada laman websitenya juga banyak mengeluarkan rilis hasil penelitian seputar radikalisme. Isu radikalisme menjadi fenomena ideologi, sosial dan politik yang menarik kalangan pengamat politik, sosial, pendidikan, filsafat, dan Pancasila. Hasil Kajian Huda dan Haryanto menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia awal masuknya paham radikalisme di Indonesia berawal dari NII/DI/TII. Isu isu yang dikembangkan kelompok teroris akan selalu berkembang di masyarakat dan mereka memanfaatkan momen momen tertentu (Huda dan Haryanto, 2018). Proses pemanfaatan momen tertentu ini dapat melalui sistem politik dan hukum, mendirikan partai politik, dan memanfaatkan negara dalam posisi lemah. Menurut Kasman, titik awal kebangkitan radikalisme di Indonesia adanya Aksi Bela Islam 212 pada 2 Desember 2016 yang diklaim dihadiri jutaan manusia.

Peristiwa tersebut menjadi titik penentu bagi



sikap pemerintah Indonesia terkait pembungkaman radikalisme Islam sebagai ancaman politik (Kasman, 2020). Untuk itu, pada tahun 2017, pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada pasal 3 Perpres No 54/2017 ini menjelaskan bahwa:

“UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan”.

Gagasan munculnya lembaga negara atau unit kerja presiden yang memfokuskan untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan ideologis yang terjadi di masyarakat. Fenomena sosial dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menunjukkan ketegangan dalam bentuk perdebatan dan perebutan legitimasi atas nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara harus menganut pada suatu paham apa.

Keberadaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ini sebagai dampak atas pelemahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini kemudian diperkuat menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan ini sebagai upaya untuk penguatan dan perluasan ruang lingkup dan peran Unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam melakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

Sejak lahirnya lembaga ini Pancasila

diletakkan sebagai ideologi negara menjadi lebih masif. Namun kontestasi ideologi masih terjadi baik di level negara, ormas, dan masyarakat. Pergeseran ideologi di masyarakat semakin nampak nyata ketika muncul kelompok-kelompok yang ingin membawa pada sistem nilai baru, sistem nilai yang fundamental berhaluan agama tertentu sebagai sistem sosial dan politik nasional. Hasil temuan berbagai penelitian dan kajian selama 10 tahun terakhir ini menunjukkan Ketahanan ideologi di masyarakat semakin melemah.

Berbagai pemberitaan yang dirilis oleh berbagai media nasional seperti Kompas, Tempo, detik.com, Liputan 6, CNN Indonesia, Beritasatu, VOA Indonesia, Merdeka, BBC, Republika, Jawa Pos 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2020 mengungkap tentang fenomena sosial dan politik yang terjadi di negeri ini yaitu masuknya ideologi baru dan ideologi transnasional yang diistilahkan dengan “radikalisme”, “fundamentalisme”, “ekstrimisme”. Ketiga istilah tersebut mewarnai berbagai media media nasional dan lokal. Isu-isu yang muncul masuknya paham tersebut ditujukan pada sejumlah kalangan terutama kalangan mahasiswa, dosen, Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberitaan tentang mahasiswa yang “hilang” dan terpapar paham radikalisme juga menjadi bahan berita di media nasional dan lokal.

Penelitian ini akan membahas tentang dinamika ideologi yang berkembang di masyarakat pada masa paska reformasi khususnya pada masa pandemi covid 19. Secara teoritis fenomena radikalisme memiliki tiga karakter utama yaitu: pertama, radikalisme sebagai response dalam bentuk evaluasi, kritik, penolakan atau perlawanan atas kondisi yang sedang berlangsung baik berupa asumsi, nilai atau bahkan lembaga agama atau negara. Kedua, radikalisme selalu berupaya untuk mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang di sistematisir dan dikonstruksi melalui *world view* (pandangan dunia) mereka sendiri. Ketiga, kuatnya keyakinan akan kebenaran ideologi yang



mereka tawarkan (Robingaton, 2017:99). Konsepsi teoritis ini akan memotret bentuk bentuk ideologi radikal di masyarakat baik secara sosial dan politik yang berkembang pada masa pandemi.

Pandemi covid 19 mulai muncul pada awal tahun 2020, kasus tersebut kemudian menjadi persoalan global. Pandemi covid 19 menjadi persoalan global karena berdampak simultan bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dampak yang terlihat dalam bidang ekonomi dan sosial. Tulisan ini akan menelusuri tentang dinamika sosial dan politik secara khusus ideologi yang terjadi di suatu wilayah pada masa pandemi covid-19. Bagaimana ketahanan ideologi di masyarakat dalam menghadapi isu isu kebangsaan seperti radikalisme, fundamentalisme, ekstrimisme, dan intoleransi. Bagaimana masyarakat membangun nilai nilai kebangsaan dan mempertahankannya pada era sekarang ini? dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan ideologis yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan pendalaman studi tentang trend ketahanan ideologi di wilayah DIY. Telaah tentang dasar dasar ideologis yang dimiliki masyarakat serta perkembangannya menjadi menarik untuk digali dan dieksplorasi secara mendalam. Memahami masyarakat dan ruang hidupnya dalam hal ini wilayah menjadi penting dalam studi ketahanan nasional. Ikon-ikon dan simbol simbol di suatu wilayah masih menjadi bagian penting dalam proses pembentukan nilai dan jati diri di dalam masyarakat. Dalam hal ini identitas masyarakat dan kelompok masyarakat akan berpengaruh dan dipengaruhi atas ikon dan simbol simbol serta nilai nilai yang ada di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini

berdasarkan dari observasi, jurnal ilmiah, buku, dan sumber sumber pemberitaan yang diterbitkan oleh media arus utama di Indonesia seperti kompas, kedaulatan rakyat, dan tribun Jogja. Analisis data menggunakan pendekatan analisis kritis dan induksi untuk mendapatkan esensi dari data dan dokumen yang ada. Tahapan analisis data melalui reduksi data, berarti data yang didapatkan diseleksi, dikategorikan sesuai dengan topik penelitian dan dilakukan analisis. Setelah reduksi data dilakukan pemaparan dan penarikan kesimpulan dari analisis kritis dan induksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah ideologi menjadi topik penting dalam pembahasan dan pembicaraan para ahli tentang negara, politik, media, psikologi, sosiologi, dan filsafat, serta disiplin lainnya. Ideologi merupakan istilah yang selalu didefinisikan ulang untuk melakukan interpretasi, reformulasi, dan meletakkan gagasan tentang negara, masyarakat, dan individu. Moazzam menjelaskan bahwa memahami ideologi dapat dimulai dari aspek pendekatan, penampakan, dimensi yang muncul, dan tipologi yang berkembang (Moazzam, 2017).

Kaelan menjelaskan bahwa dalam ideologi yang melekat pada individu dibentuk melalui interpretasi dimana subyek mengakui dirinya sebagai subyek yang mengarah pada kesadaran (Kaelan, 2015). Pandangan lain menyebutkan ideologi berkaitan dengan harga diri. Dalam kamus Filsafat Nilai, ideologi diartikan sebagai "*belief system*", pengetahuan yang mengandung pemikiran pemikiran besar, cita cita besar tentang sejarah manusia, masyarakat, dan negara (Mudhofir, 2014:207). Ideologi merupakan sistem idea yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi suatu masyarakat/bangsa dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan (Moedjanto, 1996:55). Secara umum, ideologi sering diartikan



sebagai sekumpulan gagasan dan konsep bersistem dan sering dipahami sebagai paham, teori, dan tujuan yang terpadu bagian dari program sosial politik (Rohman,2009:19). Ideologi selalu hadir dalam setiap program politik tetapi mengabaikan program yang dimaksudkan sebagai pemeliharaan dan transformasi sosial. Ideologi juga selalu dikaitkan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris (Warjio,2016:255).

Ketahanan ideologi mulai diperkenalkan sebagai upaya untuk menerjemahkan pengertian secara fungsional dan struktural tentang ideologi. Ideologi secara fungsional dimaknai sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama (*common goods*) atau tentang masyarakat dan negara yang paling baik. Sedangkan secara struktural ideologi sebagai sistem pembenar seperti gagasan gagasan dan formula politik pada setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa (Surbakti,1992:32;Rohman,2009:19-20).

Teori ketahanan nasional mulai diperkenalkan oleh para pemikir kenegaraan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang arti penting ketahanan nasional bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Pengertian Ketahanan nasional berkembang sesuai dengan konteks zaman dan seiring perkembangan pemikiran manusia. Ketahanan nasional berkaitan dengan ketangguhan, keuletan, dan daya tahan secara nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan.

Ketahanan nasional suatu negara dianggap tangguh ketika negara mampu menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan dan mampu mengatasinya. Ketahanan nasional suatu negara dianggap kurang tangguh atau tidak tangguh ketika suatu negara tidak mampu mengatasi persoalan ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang terjadi.

Negara yang dapat bertahan atau memiliki ketahanan nasional yang tangguh ketika negara dapat menjalankan fungsi fungsi negara dengan baik dan nilai nilai dasar yang dimiliki oleh negara dapat dijalankan. Ketahanan nasional suatu negara dapat berpengaruh pada ketahanan masyarakat dan anggota masyarakat yang ada. Pengaruh ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi bernegara yang sudah diletakkan sejak Indonesia merdeka. Dasar dan ideologi bernegara ialah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara termuat di dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila dipandang sebagai cita cita luhur negara dan bangsa Indonesia (Moedjanto, dkk, 1996:55). Oleh karena itu, Pancasila merupakan ideologi negara yang bersumber dari sistem nilai bangsa Indonesia sejak lama. Apabila Pancasila diletakkan sebagai ideologi negara, Pancasila hendaknya menjadi cita cita kenegaraan yang perlu dilaksanakan dalam perbuatan melalui kekuasaan yang berstruktur (Haz,2006:5). Menurut Suyitno dan Gultom Pancasila sebagai satu kesatuan dan sila sila Pancasila dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai keadaan masyarakat, bangsa, dan negara pada waktu lampau dan masa kini. Dengan perkataan lain, Pancasila dapat digunakan sebagai lensa menganalisa situasi sosial, keadaan masyarakat dan negara (Suyitno dan Gultom, 1981:12).

Pancasila dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur ketahanan nasional negara Indonesia dari aspek ideologi. Ukuran atau standar tersebut dapat dilihat dari aspek umum dari sila sila Pancasila. Pancasila sebagai standar umum dan validitas nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Standar umum dapat mengacu pada fenomena perbuatan dan tindakan yang dilakukan masyarakat, apakah merujuk Pancasila atau tidak.



Gambar 1. Terima kost putri Muslimah, dokumen peneliti diambil di kawasan Sleman, 6 Maret 2021.

Gambar 1. di atas sebagai bukti bahwa standar umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak mengacu pada nilai nilai Pancasila.

Pemahaman akan sikap toleransi, keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, dan rasa kebangsaan mulai luntur di masyarakat. Standar nilai yang dirujuk untuk menghargai harkat dan martabat manusia yang setara menjadi tereduksi akibat dari iklan dan promosi yang berbentuk spanduk dengan identitas keagamaan tertentu. Makna toleransi diartikan berbeda ketika melihat iklan tentang kos yang berlabel dengan prasyarat identitas agama tertentu. Fenomena ini sudah merebak 10 tahun terakhir yang terjadi di kota pendidikan dan daerah daerah yang berdekatan dengan kampus. Tempat kos mulai bermunculan tulisan yang dibuat oleh pemilik kos atau pengelola kos dengan label identitas keagamaan tertentu.

Yogyakarta sebagai kota pelajar atau pendidikan telah kehilangan nilai nilai kebangsaan, keberagaman, dan Pancasila. Ketika lingkungan sekitar dan masyarakat memiliki standar umum yang berbeda dalam memandang kehidupan manusia untuk bisa mendapatkan akses dan layanan tinggal sementara. Situasi ini menjadi sorotan nasional tentang posisi Yogyakarta sebagai

kota pendidikan dan pelajar yang dianggap kurang memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan keteladanan kepada daerah lain. Fenomena yang lain muncul spanduk bertuliskan hari lahir Pancasila ialah 18 Agustus di daerah Kotagede, Yogyakarta sebagaimana tergambar dalam spanduk yang dipasang di pinggir jalan daerah Kotagede.

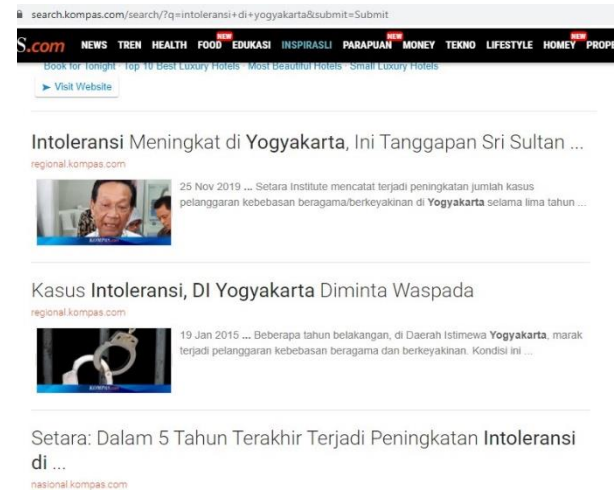


Gambar 2. foto arsip Eri Ratmanto, diambil 20 Agustus 2020 di daerah Kotagede, Yogyakarta.

Gambar 2 di atas menunjukkan fenomena gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah yang memiliki berbagai julukan salah satu julukan yang menarik perhatian ialah Yogyakarta *the city of tolerance*. Slogan ini muncul karena Yogyakarta dikatakan sebagai ikon keberagaman, ikon kebangsaan, dan ikon taman mini Indonesia. Slogan Yogyakarta, *the city of tolerance* mulai disuarakan pada periode tahun 2000an. Slogan ini muncul untuk memberikan identitas tentang suasana sosial dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Salim menjelaskan bahwa pada dasarnya hasrat dan kodrat manusia adalah membangun persatuan, perdamaian, kestabilan, dan keseimbangan, tanpa unsur tersebut struktur kehidupan manusia tidak dapat berjalan (Salim,2014:9).

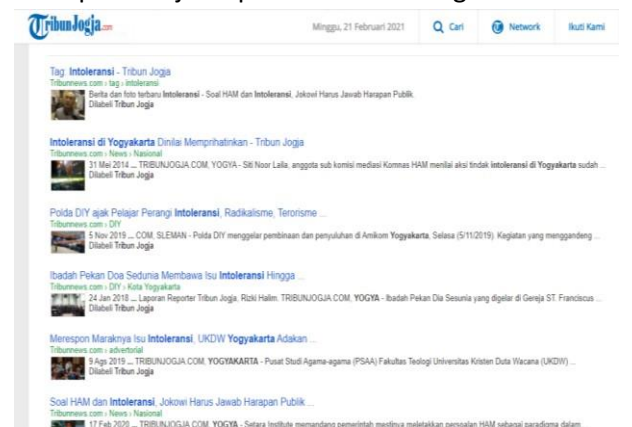
Adanya asrama asrama daerah yang berkembang dan tumbuh dengan baik di wilayah Yogyakarta menjadi potret keberagaman di Yogyakarta sebagai bentuk taman mini Indonesia. Selain itu, Yogyakarta sebagai kota pusat pendidikan nasional, banyak mahasiswa datang untuk belajar di Yogyakarta menunjukkan interaksi sosial dan budaya semakin memberikan pesan dan kesan Yogyakarta sebagai daerah yang toleran untuk semua suku bangsa, golongan, dan kelompok untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi. Namun slogan Yogyakarta sebagai *city of tolerance*, kemudian banyak dipertanyakan ketika maraknya gerakan ideologi baru masuk ke wilayah Yogyakarta dengan membawa nilai nilai baru bagi masyarakat. Fenomena munculnya gerakan ideologis yang membawa nilai baru telah mengubah wajah masyarakat menjadi berjarak. Pada tahun 2017, CRCS menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk buku dengan judul *Krisis Keistimewaan Yogyakarta Kekerasan terhadap minoritas* (Ahnaf dan Salim, 2017). Buku ini menjelaskan tentang bentuk bentuk dan aksi kekerasan yang muncul dan terjadi di Yogyakarta yang berlatar belakang agama maupun politik. Dalam laporan Setara Institute (2017) juga menunjukkan bahwa Yogyakarta termasuk menduduki skor terendah sebagai kota atau daerah toleransi karena memiliki skor di bawah 4 yaitu 3.40. Nilai skor di bawah 4 termasuk kategori daerah yang berkategori rendah untuk tingkat toleransinya. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Yogyakarta muncul berbagai kasus kasus intoleransi dalam 5 tahun terakhir. Namun kasus kasus tersebut tidak banyak mendapatkan response dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Ketahanan nasional di bidang ideologi dalam masyarakat mengalami titik lemah. Titik lemah ini semakin terafirmasi ketika muncul kasus kasus intoleransi yang membawa rendahnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara di masyarakat untuk hidup rukun. Misalnya, pada mesin pencarian di media kompas.com untuk kata

kunci intoleransi di Yogyakarta tercatat pemberitaan seputar topik intoleransi di Yogyakarta sebanyak 4.320 jenis isu isu pemberitaan tentang intoleransi di Yogyakarta.



Gambar 3. Pemberitaan seputar intoleransi di Yogyakarta pada media online kompas.

Gambar 3 di atas menunjukkan pemberitaan yang disampaikan oleh kompas.com tentang isu isu kebangsaan dengan kata kunci intoleransi menekankan pada isu isu seputar relasi warga negara dengan pemerintah, dan relasi warga negara dengan kelompok kelompok organisasi kemasyarakatan yang lain, dan persoalan peran aktor lokal dalam meresponse isu isu kebangsaan tersebut. Pada media tribun ketika menggunakan kata kunci yang sama intoleransi di Yogyakarta terdapat 825 jenis pemberitaan sebagai berikut:



Gambar 4. Pemberitaan seputar intoleransi di

Yogyakarta pada media online tribun jogja.

Pada gambar 4 menunjukkan pemberitaan di media online tribun jogja bahwa isu kebangsaan turunan terkait dengan intoleransi juga terdapat isu radikalisme, fundamentalisme yang diungkap dalam pemberitaan pada media online tribun jogja. Begitu juga terjadi dalam pemberitaan media online kompas.com. Media online Kedaulatan Rakyat menunjukkan catatan seputar isu kebangsaan dengan kata kunci intoleransi di Yogyakarta terdapat 106 pemberitaan tentang intoleransi, radikalisme dan fundamentalisme.



Gambar 5. Pemberitaan seputar intoleransi di Yogyakarta pada media online Kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pada gambar 5 di atas tentang pemberitaan media online seputar isu kebangsaan di media Kedaulatan Rakyat online menunjukkan jumlah peliputan sebanyak 106 pemberitaan. Berdasarkan fakta tersebut ditemukan bahwa struktur pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai atau tidak sesuai dan yang ideal atau tidak ideal telah kehilangan standar nilai universalnya. Setiap orang atau masyarakat

ingin meletakkan standar nilai dan norma untuk kehidupan dirinya dan orang lain serta daerahnya, sehingga menyebabkan konflik dan berujung pengabaian martabat manusia yang mulia. Kasus yang muncul pada periode tahun 2014-2019 telah terpotret dalam berbagai pemberitaan media yaitu: Front Jihad Islam membubarkan perkemahan siswa Kristen di bumi perkemahan Cangkringan, Sleman; FJI membubarkan pengajian rutin Minggu Pahing Majelis Taklim Raudhatul Jannah di dusun Sumberan, Kasihan, Bantul (2014). Kasus pembakaran gereja baptis Indonesia di Saman, Sewon, Bantul (2015), pengrusakan kompleks Gua Maria Semanggi Bangunjiwo, Bantul, FUI memaksa kampus UKDW untuk menurunkan Baliho mahasiswa berjilbab karena itu representasi simbol Islam (2016), Penolakan Camat Pajangan Julius Suharto di Kabupaten Bantul karena yang bersangkutan non Muslim, padahal sudah dilantik Bupati Bantul, pembatalan acara kebaktian nasional reformasi 500 tahun Gereja Tuhan di Yogyakarta (2017), pembubaran dan perusakan sedekah laut di pantai Pandansimo Bantul, pemotongan nisan salib milik Albertus Slamet Sugiardi di kelurahan Purbayan Kota Gede, penolakan bakti sosial Panitia Gereja Santo Paulus Pringgolayan, Bantul oleh Front Jihad Islam (2018), pembubaran upacara peringatan wafatnya Ki Ageng Mangir di dusun Mangir, Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangtengah III, Kabupaten Gunung Kidul mengeluarkan surat edaran berisi kewajiban siswa-siswi mengenakan seragam muslim, Slamet Jumiarto seorang pelukis ditolak mengontrak di dusun Karet, Desa Pleret Bantul karena beragama Katolik (2019). Fenomena ideologi, sosial dan politik di atas terjadi tentu saja tidak dapat lepas dari peran aktor politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat setempat. Faktor *enabler*, pemberian peluang dan kesempatan kepadakelompok atau orang untuk melakukan pembenaran atas tindakan dan perbuatan untuk dijadikan standar nilai dan norma bagi kelompok masyarakat yang lain sebagai bentuk lemahnya ketahanan ideologi Pancasila di

masyarakat. Berikut ini salah satu contoh iklan dari lembaga kemanusiaan juga menampilkan potret ideologi juga dapat berperan menggerakkan orang, mengajak orang, dan membujuk orang sesuai dengan kecenderungan nilai-nilai yang dibawa.



Gambar 6.1. foto diambil di sekitar jalan Affandi Yogyakarta, 18 Maret 2021.



Gambar 6.2. foto diambil di sekitar perempatan Demangan Yogyakarta, 18 Maret 2021.

Gambar 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua fenomena yang menarik yang menampilkan peran ideologis pada salah satu lembaga kemanusiaan dan sosial terkenal dengan membuat iklan untuk mengajak, menghimbau, mengharapkan, dan mengundang masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial. Gambar 6.1. “Ayo Sedekah Pangan...” menampilkan nilai nilai ideologi yang dibawa dari lembaga tersebut untuk memberikan pesan terkait posisi dari lembaga yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan atau sosial bagi masyarakat atau orang yang kurang pangan/makan. Pada gambar 6.2 “Topang Keluarga Palestina Teraniaya”,

yang dilakukan oleh lembaga yang sama menampilkan nilai nilai ideologi lintas negara, lintas bangsa. Lembaga kemanusiaan dan sosial pada dasarnya tidak lepas dari posisi ideologis yang dimiliki dan keberpihakan dalam memberikan bantuan sosial atau kemanusiaan. Dua iklan tersebut menunjukkan bahwa kerja ideologi dapat bermain pada berbagai dimensi seperti dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, kemanusiaan, pendidikan, dan hukum. Berbagai hasil kajian dan survei yang dilakukan oleh lembaga survei dan riset pemerintah dan non pemerintah menunjukkan situasi bahwa kesadaran berpancasila di masyarakat semakin menurun sejak 10-13 tahun terakhir di 13 Provinsi di Indonesia (Rukmana, Samsuri, Wahidin, 2020).

Peran aktor aktor politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama cenderung membiarkan terhadap aksi aksi intoleransi. Peristiwa yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan ketahanan ideologi Pancasila di wilayah dinilai rawan. Kerawanan ini dapat terlihat dari intensitas tindakan intoleransi semakin meningkat, konflik ideologis semakin banyak, dan hubungan antar umat beragama atau masyarakat semakin kurang harmonis karena perbedaan paham. Bukti yang menunjukkan bahwa aksi intoleransi semakin menguat dengan diterbitkan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Konflik Sosial. Aturan ini dianggap sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah intoleransi diskriminasi di DIY. Kejadian yang melanda Yogyakarta dan aksi aksi yang dilakukan memiliki akar sejarah ideologis yang panjang terkait dengan interaksi dengan dunia luar.

Fenomena ideologis yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, pada tahun 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme

Tahun 2020-2024. Peraturan tersebut sebagai upaya untuk memberikan dasar hukum dalam menangani persoalan ekstremisme yang mengarah pada tindak terorisme. Dengan adanya peraturan presiden tersebut terdapat indikasi kuat di masa pandemi upaya gerakan yang mengarah pada intoleransi dan ekstremisme tidak semakin meredup tetapi dinilai oleh negara semakin meningkat. ketahanan ideologi di masyarakat juga dinilai melemah karena belum mampu mengantisipasi masuknya ideologi asing atau ideologi yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila. Buchori menjelaskan bahwa tanpa nilai nilai yang tersusun secara hirarkhis, seseorang akan menjadi plin plan (Buchori,2005:13). Begitu juga dengan suatu negara yang kehilangan nilai nilai dasarnya segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan akan menjadi plin plan termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Munculnya gerakan yang dianggap bertentangan dengan nilai nilai Pancasila sebagai sebab dan akibat fondasi nilai nilai yang telah di miliki oleh masyarakat dan negara tidak tersusun dengan hirarkhis.

Pada masa pandemi covid 19 sejak 2020 juga muncul berbagai aksi aksi yang tetap masih dengan bentuk bentuk yang berbeda dengan menggunakan media sosial, elektronik, teknologi digital melalui dakwah, ceramah, kegiatan kegiatan propaganda dan manipulasi atas nilai nilai yang ada di masyarakat. Sehingga, kejadian munculnya aksi aksi intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme tidak langsung bertentangan dengan Pancasila tetapi ada interaksi interaksi dengan dunia luar yang membawa pengaruh pada ideologi dan sistem nilai yang dimiliki. Pemerintah Daerah menanggapi semakin memuatnya aksi aksi intoleransi di masyarakat dengan melaksanakan berbagai program khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY dengan membuat program Sinau Pancasila sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2021

Bakesbangpol membuat program sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika ke berbagai kecamatan di wilayah DIY. Gagasan adanya program sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika karena muncul kerawanan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Nilai nilai dasar pada Pancasila dianggap luntur di masyarakat. Berikut ini salah satu gambaran kegiatan yang dilakukan Kesbangpol DIY untuk menyampaikan nilai nilai kebangsaan di masyarakat.



Gambar 7. Kegiatan sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, di Kecamatan Kretek, Bantul DIY, 10 Februari 2021.

Berdasarkan dari gambar 7 di atas menunjukkan bahwa penanaman ideologi Pancasila menjadi penting untuk membangun keyakinan dan nilai nilai kebangsaan di masyarakat. Pada dasarnya Ideologi digerakkan atau tidak digerakkan ia akan tetap bergerak dari dalam. Ideologi bergerak dari kerelaan dan nilai nilai yang melekat di dalam masyarakat atau individu. Terdapat kesamaan ideologi secara universal. Ideologi ialah bergerak dengan cara pengabdian dan dedikasi. Ideologi lahir dari keyakinan yang mendalam tentang hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Ketahanan nasional secara ideologis di masyarakat perlu kembali diperkuat untuk mengatasi persoalan ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan ideologis. Dalam salah satu jajak pendapat yang diberikan kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan karang taruna di wilayah Kecamatan (Kapanewon) Bantul tentang nilai nilai apa saja yang masih ada di kehidupan masyarakat dan nilai nilai Pancasila yang mana yang mulai melemah atau

hilang di kalangan masyarakat. Sebagian peserta menyebutkan bahwa nilai-nilai yang masih ada yaitu gotong royong. Kemudian nilai-nilai yang hilang di masyarakat ialah persatuan, keadilan sosial, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan musyawarah mufakat (hasil dari jajak pendapat pada acara sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, di Kapanewon Bantul, 18 Februari 2021).

Isu-isu lokalitas yang berkaitan dengan ideologi menjadi menarik untuk dieksplorasi dan didokumentasi sebagai potret fenomena sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Pada masa pandemi Covid 19 selama 1 tahun lebih ini telah menunjukkan fenomena sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Fenomena sosial menunjukkan imajinasi dan kohesi sosial mulai menurun karena intensitas pertemuan dibatasi, orang tidak boleh berkerumun, dan upaya untuk membangun relasi sosial lebih intensif semakin terbatas. Fenomena politik ideologis muncul adanya pergeseran nilai dan perubahan nilai karena masuknya ideologi baru yang dibawa dari luar.

Isu-isu lokalitas berkaitan ideologi Pancasila yang muncul di masyarakat antara lain: masalah keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apabila Pancasila diletakkan sebagai dasar ideologi negara sebagai batu uji dan tolok ukur nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentu saja ideologi Pancasila akan meletakkan martabat kemanusiaan untuk dijunjung tinggi, sehingga Pancasila tidak akan memandang rendah manusia yang lain (Moedjiyanto, 1996). Masuknya ideologi baru ini menjadikan nilai-nilai sudah ada mulai luntur dan menghilang. Ideologi baru ini ingin meletakkan konsepsi ideologisnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara fungsional dan struktural. Secara

fungsional, mendefinisikan kebaikan bersama berdasarkan dalil-dalil keyakinan dan nilai agama, golongan, suku, ras, mazhab, paham tertentu sebagai suatu yang terbaik dan paling baik untuk menjadi kebaikan bersama.

Secara struktural, ideologi baru ini ingin menjadi sistem pembenar dan formula politik sosial untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan negara. Untuk itu, martabat kemanusiaan mulai tidak dipandang ketika berhadapan dengan ideologi lain yang berpijak pada pedoman dan aturan-aturan yang berbeda dalam memandang masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan melalui berbagai jalur baik jalur formal dan informal. Jalur formal melalui pendidikan yang bersifat formal dan informal melalui kegiatan kemasyarakatan dan menunjukkan praktek-praktek baik yang terjadi di masyarakat untuk lebih maksimal. Pada tingkat masyarakat, untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila muncul berbagai gerakan masyarakat seperti masyarakat cinta Pancasila, Komunitas Pancasila dasar NKRI, Barisan Nasionalis Pancasila, hadirnya kampung Pancasila, dan dusun Pancasila merupakan bentuk-bentuk informal dalam mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap persoalan ideologis secara nasional dapat tergambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Spanduk dari kelompok masyarakat, diambil di sekitar tugu Yogya, 6 Maret 2021.



Gambar 7 di atas merupakan gambar spanduk yang dipasang oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Jogja bertuliskan menolak keberadaan lembaga amal zakat Abdurahman Bin Auf (LAZ ABA). Lembaga ini dianggap sebagai alat yang digunakan sebagai penggalangan dana terorisme. Pernyataan “dari Yogyakarta tolak segala bentuk radikalisme dan terorisme” merupakan ekspresi atas situasi sosial yang muncul berkaitan dengan ideologi. Spanduk ini sebagai ekspresi dari sekelompok masyarakat Yogyakarta dengan menggunakan standar umum nilai nilai yang dimiliki. Nilai nilai Pancasila hendak diletakkan sebagai dasar dan validitas nilai dalam mengukur setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau organisasi yang lain. Hadirnya spanduk tersebut sebagai wujud telah terjadi kontestasi ideologi dan nilai nilai di masyarakat Yogyakarta. Kelompok yang satu membawa standar umum dan nilai yang berbeda dengan nilai nilai Pancasila dengan membuat spanduk iklan menyediakan jasa sewa kamar kos hanya khusus untuk agama tertentu. Di satu sisi, muncul kelompok yang lain mengatasnamakan warga masyarakat Yogyakarta menolak keberadaan lembaga amal zakat yang dimanfaatkan untuk penggalangan dana terorisme di Yogyakarta. Apabila perbedaan standar umum atas legitimasi dan validitas nilai nilai hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibiarkan di masyarakat secara terus menerus akan berpotensi pada konflik dan disintegrasi bangsa.

Untuk itu, memosisikan kembali Pancasila sebagai dasar negara juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara untuk memberi pedoman dan arah bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam bersikap dan berbuat. Ketahanan ideologi Pancasila, apakah kuat atau lemah di masyarakat pada dasarnya dapat terlihat dari perilaku dan sikap secara umum yang dilakukan masyarakat

dalam meresponse isu isu kebangsaan yang terjadi. Pancasila dalam hal ini menjadi faktor utama pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pandangan Abdulgani juga menegaskan bahwa pentingnya pemerintah dan penguasa menjalankan politik kenegaraan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan dasar dan ideologi Pancasila, karena hanya dengan politik yang demikian pemerintah dan penguasa dapat menciptakan kondisi kondisi ketahanan nasional yang mantap (Abdulgani, 1979).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan persoalan kebangsaan yang muncul di wilayah DIY sebagai dampak dan sebab dari interaksi ideologis yang muncul dari luar dan membawa sistem nilai baru yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tekanan ideologis yang kuat dari luar ke dalam masyarakat dan masyarakat pada saat yang bersamaan mulai kehilangan arah, pedoman, dan acuan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila menjadikan ketahanan nasional di masyarakat menjadi lemah. Pada masa pandemi covid 19, terdapat upaya untuk memperlemah Pancasila melalui teknologi dan media media elektronik. Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan nilai nilai Pancasila dan memperkuat ketahanan nasional di masyarakat melalui program sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dan Sinau Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Ruslan.1979. *Pengembangan Pancasila di Indonesia*.Jakarta: Idayu.
- Ahnaf, Iqbal dan Salim, Hairus. 2017. *Krisis Keistimewaan Yogyakarta Kekerasan terhadap minoritas*. Yogyakarta: CRCS.UGM.
- Buchori.Mochtar.2005. *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Farida.Umma. 2015. Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 1, Februari 2015, hal.145-163.
- Hakim. Lukman Nul.2020. Politisasi Islam, Depolitisasi Demokrasi Islam Politik dan Multikulturalisme Pasca Orde Baru. *Prisma*, Vol.39, No.1.2020. hal.3-14.
- Haz.Hamzah.2006. "Kembali Kepada Nilai Nilai Pancasila". *Dalam Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila, Ika Dewi Ana, Singgih Hawibowo, dan Agus Wahyudi (ed). Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*. UGM, 14 dan 15 Agustus 2006. Yogyakarta: Aditya Media.
- Huda.Ulul. Haryanto, Tenang, Haryanto.Budiman Setyo.2018. Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14- 15 November 2018. Hal.541-542.
- Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Konflik Sosial.
- Kasman.Airlangga Pribadi.2020. Mengawasi "Radikalisme" Pendekatan Kultural dan Kebijakan Illiberal Pasca Momen 212. *Prisma*, Vol.39, No.1.2020. hal.16-27.
- Kaelan.2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta; Paradigma.
- Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.
- Maharani.Dwi Putri, Surono, Sutarmanto, Hadi, Zubaidi, Ahmad.2019. Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol.25, No. 2, Agustus 2019. Hal.277-294.
- Manan. Munafrizal.2005. *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Mudhofir, Ali.2014. *Kamus Filsafat Nilai*. Jakarta: Yayasan Kertagama.
- Moazza. Areeba Ahsanat. 2017. Understanding "Ideology": It"s Aspects, Features, Dimensions and Types, 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSS-17) March 13-14, 2017 Dubai (UAE).
- Moedjanto,dkk.1996.*Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan APTIK.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Robingatun.2017. Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan. *Empirisma*, Vol.26 No.1, Januari 2017.hal.97-106.
- Rokhmad.Abu.2012. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo*,



No.20 Nomor.1, Mei 2012. Hal.79-113.

- Rohman.Arif.2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta:LaksBang Mediatama.
- Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional, Vol.26, No. 2, Agustus 2020. Hal.182-203.*
- Salim.Agus.2014. *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, cetakan kedua*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- SKB.2020. Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
- Surbakti. Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Setara Institute.2017. *Indek kota toleran*. <https://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>, diakses 6 Maret 2021 pkl. 15:00.
- Suyitno,Amin dan Gultom. 1981. *Memahami Pancasila dan P-4*. Semarang: Penerbit SW.
- Warjio.2016. *Politik Pembangunan Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Rukmana. Isna Sari, Samsuri, Wahidin. Darto.2020. *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Trirenggo Kabupaten Bantul*.